

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes SEMARAK BERSERI DESA SUMBER RAHAYU KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM SUMSEL)

Fitria

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Furqon Prabumulih

Email: ayul6254@gmail.com

ABSTRACT

BUMdes (Village Owned Enterprises) is a village business institution that is managed by the community and village government in an effort to strengthen the economy and is formed based on the needs and potential of the village. But expectations have not been fully achieved for several reasons. It is different from the Semarak Sei BUMdes which is able to affect the level of poverty in the village of Sumber Rahayu. The purpose of this study is to describe and examine community economic empowerment through BUMdes and its implications. This research uses a qualitative approach with the type of case study. The result of this research is the process of community economic empowerment carried out by BUMdes Semarak Berseri by providing capital, institutional strength, and partnerships. and the impact of the BUMdes is an increase in the level of community income and the insight of BUMdes employees.

Keywords: *Empowerment, Economy, Community, BUMdes, Welfare*

ABSTRAK

BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun harapan belum sepenuhnya tercapai karena beberapa alasan. Berbeda dengan BUMdes Semarak bersei yang mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan di desa Sumber Rahayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMdes beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil Penelitian ini adalah proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMdes Semarak Berseri yaitu dengan memberikan modal, kekuatan kelembagaan, serta kemitraan. serta dampak dengan adanya BUMdes adalah bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat serta bertambahnya wawasan para pegawai BUMdes.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat, BUMdes, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Karena itu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. (www.bkbn.go.id)

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, karena kesejahteraan itu sendiri mampu memberi dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Beberapa dampak tersebut adalah pertama, masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain. (Nur Mahmudi Ismail, 2001 : 28)

Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan pemberdayaan atau *empowerment*. Pemberdayaan merupakan strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Paradigma ini muncul sebagai jawaban atau reaksi dari kegagalan pembangunan yang cenderung sentralistis. Model tersebut memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Iswan Gemayana, 2010 : 188).

Pemberdayaan adalah suatu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Abdul Bashith, 2012 : 27),

Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat ar-Ra'd ayat 1. Allah telah menyeru kepada seluruh umat manusia agar senantiasa berusaha untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Dalam ayat itu juga menjelaskan jika seburuk apapun keadaan manusia dapat berubah jika ada kemauan dalam dirinya. Menurut Mardi Yatmo Hutomo Pemberdayaan dapat dicapai melalui Bantuan Modal, Bantuan Pembangunan Prasarana, Bantuan Pendampingan,

Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kemitraan Usaha (Mardi yatmo *Hutomo* , 2000, 8-9). Bahkan pemerintah selalu menggalakkan program tentang pemberdayaan ekonomi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada setiap desa agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. (<http://www.aminjaya.desa.id>)

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program pemerintah yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan. Maka muncullah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.(Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia)

Kawasan pinggiran memang selalu menjadi permasalahan bagi negara dimana kawasan desa yang identik dengan tertinggal, terisolasi bahkan mayoritas penduduk tidak mengenyam pendidikan, mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa desa adalah salah satu daerah yang harus diperhatikan. (www.kerjanyaata.id)

Indonesia terdiri atas kurang lebih 82 ribu desa. Artinya, negeri ini punya lebih dari 80 ribu ciri khas dan potensi.(<https://www.bps.go.id/>) Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif.

Menggelorakan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia adalah salah satu cara agar urbanisasi tidak lagi terjadi, daerah perkotaan yang semakin sempit menjadi tujuan utama para pemuda untuk mengadu nasib meningkatkan pendapatan. Mereka menganggap bahwa desa tidak mempunyai sesuatu yang menjanjikan di masa yang akan datang sehingga mereka memilih untuk urbanisasi. Namun melihat jumlah desa yang lebih banyak dari daerah perkotaan seharusnya pandangan itu sudah tidak lagi berlaku karena setiap desa mempunyai potensi yang berbeda yang bisa dikembangkan oleh karena itu dalam mengembangkan potensi desa butuh banyak pihak yang terlibat seperti masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. (<https://www.kemendesa.go.id/>) BUMdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

BUMdes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMdes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (www.kerjanyaata.id)

Untuk mengatur operasional BUMdes, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Amelia Sri Kusuma Dewi , 2015:6)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (1) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMdes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. ((<https://www.kemendesa.go.id/>)

Namun cita-cita tersebut belum tercapai secara maksimal seperti yang diketahui bahwa

masih banyak desa yang terkategori sebagai desa tertinggal daripada kategori desa maju. Penelitian yang dilakukan Ni Luh Wiagustini, bahwa tidak tercapainya cita-cita tersebut karena strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMdes kurang tepat sasaran. Strategi yang tepat untuk mendorong berkembangnya BUMdes sebagai salah satu unit lembaga kredit desa adalah model kemitraan terpadu. Dimana model tersebut sangat diperlukan dalam sebuah lembaga kecil agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang lebih besar seperti pihak swasta. Karena salah satu tujuan berdirinya BUMdes adalah menjembatani antara masyarakat desa dengan pihak pasar. (Ni Luh Putu Wiagustini, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto bahwa belum tercapainya tujuan utama BUMdes yaitu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. (Edy Yusuf Agunggunanto, 2016)

Berbeda dengan BUMdes Semarak Berseri yang berada di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai pengelolaan cukup baik dilihat dari menurunnya angka kemiskinan sejak didirikannya BUMdes Tersebut. (wawancara, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. (<http://BPS.go.id> Berikut angka kemiskinan di Desa Sumber Rahayu

Tabel 1
Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa Sumber Rahayu

Tahun	Persentase
2019	0,97 %
2020	0,60 %
2021	0,30 %

Sumber : Dokumen BUMdes

Data di atas menunjukkan pada tahun 2019 kemiskinan berjumlah 0,97 % pada tahun 2020 berkurang menjadi 0,60% dan pada tahun 2021 menjadi 0,30 %. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) mampu memberdayakan masyarakat sehingga kemiskinan terus menurun.

Menurut bendahara Desa Sumber Rahayu, BUMdes Semarak berseri merupakan BUMdes yang paling aktif di Kecamatan Rambang serta telah memberikan sumbangsih bagi pendapatan yang cukup besar bagi desa. Dengan usaha yang dimiliki salah satunya adalah Desa Wisata yang telah aktif di awal tahun 2021.(wawancara, 2022)

Jika dilihat dari latar belakang desa, Desa Sumber Rahayu tidak mempunyai potensi untuk dijadikan sebuah tempat pusat perekonomian seperti wisata karena lahan yang kering. Tetapi BUMdes Semarak Berseri mampu mendirikan sebuah wisata buatan ditengah-tengah desa dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan taman bermain, ada beberapa binatang ternak sebagai penarik pengunjung dan perpustakaan mini juga berada disekitar wisata.(Observasi peneliti, 2022)

Desa Sumber Rahayu berhasil melakukan pemberdayaan melalui BUMdes hal ini tentu saja tidak lepas dari pemberdayaan yang diterapkan sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi mencapai kesejahteraan dan pemerintah ikut andil dalam hal ini yaitu berperan aktif melalui BUMdes yang dikelola dengan baik, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)” (Studi kasus pada BUMdes Semarak Berseri Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Implikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi menurut Mardi Yatmo Hutomo meliputi:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya

akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti menganalisa pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody* pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya berkembang kalau ada

yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. (Mardi yatmo Hutomo, 2000 : 8-9)

Implikasi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah berdampak dalam kehidupan masyarakat seperti (Bashith Abdul, 2012 : 31) :

1. Adanya nilai kelompok yang konsisten dan sangat penting bagi individu.
2. Kelompok memiliki nilai yang jelas tentang apa yang baik dan yang harus dilaksanakan oleh anggota dan melakukan indoktrinasi yang efektif kepada anggota tentang model tersebut.
3. Kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan dalam memberikan kesempatan kepada individu berpartisipasi.
4. individu ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompok dan imbalan yang diperoleh merupakan usaha-usaha yang dilakukannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral. (Raco, 2010:5). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan suatu *inquiry* empiris yang mendalam fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas (Herdiansyah Haris, 2010:76). Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. (Basrowi, Suwandi, 2009:160)

Adapun wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), Masyarakat (anggota BUMdes), Karyawan BUMdes, Kepala Desa Sumber Rahayu. Serta dalam hal kondisi yang akan diamati adalah keadaan masyarakat Desa Sumber Rahayu, Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMdes serta kontribusi pemerintah Desa Sumber Rahayu. Sedangkan untuk memperkuat data yang diperoleh maka dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah tentang dokumen keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumber Rahayu, dokumen Kebijakan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan model analisa data Spradley (Sugiono, 2008 : 99). Adapun proses penelitian terdiri atas analisis domain, taksonomi. Agar suatu penelitian kualitatif teruji dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode Triangulasi.(Bungin Burhan , 2007 : 258).

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah atas prakarsa masyarakat desa.

HASIL PENELITIAN

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Semarak Berseri

a. Pemberian Modal

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMdes Semarak Berseri adalah dengan memberikan modal berupa dana untuk membuka usaha masyarakat seperti *Fotocopy*, *Pertashop*. Selain pemberian modal secara langsung, BUMdes Semarak Berseri juga membuat sebuah desa wisata yang terletak di desa Sumber Rahayu agar masyarakat dapat membuat area usaha di tempat tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan BUMdes Semarak Berseri.

b. Kekuatan Kelembagaan

Dalam melakukan pemerdayaan perlu adanya Lembaga yang mumpuni untuk menjalankan sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam penguatan kelembagaan, BUMdes Semarak berseri melakukan pelatihan terkait dengan pengembangan wisata air agar kedepannya dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa sumber rahayu.

c. Kemitraan

Dalam pemberdayaan masyarakat BUMdes Semarak Berseri melakukan Kerjasama dengan beberapa Lembaga seperti PT Pertamina serta LPMD (Lembaga pemberdayaan masyarakat) dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMdes Semarak berseri berdirilah beberapa usaha yaitu : wisata air, fotocopy, sewa tenda dan kursi, dan kolam renang anak.

2. Implikasi Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMdes

a. Peningkatan pendapatan Masyarakat

Impilkasi pada pemberdayaan tentunya mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari paparan di atas menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat karena adanya usaha di bawah naungan BUMdes Semarak Berseri seperti wisata air dimana masyarakat dapat membuka usaha di Kawasan tersebut yang secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan.

b. Menambah wawasan

Studi banding maupun pelatihan mempunyai tujuan meningkatkan wawasan karyawan BUMdes. Wawasan yang bertambah tentunya memberikan implikasi yang baik bagi keberlangsungan BUMdes kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BUMdes semarak Berseri adalah Pemberian Modal, kekuatan kelembagaan dan kemitraan.
- b. Impilkasi dengan adanya BUMdes Semarak berseri antara lainpeningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya wawasan pegawai BUMdes.

Saran

- a. Peningkatan jumlah usaha dibawah nauangan BUMdes
- b. Dibutuhkan pendampingan, pelatihan serta pengawasan yang cukup pada setiap usaha dibawah nauangan BUMdes sehingga dapat mengontrol jalannya usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, Ngesti D. Prasetyo, (2015). Interpretasi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, VOL. 22 NO.2 Desember 2015
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, Havis, (2016). *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua.
- Arsiyah, (2009). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Wacana*, Vol. 12 No. 2 April 2009
- Basrowi dan Suwandi, (2009). *Memahamami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin Burhan, (2007). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, (2015). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sebagai penguatan ekonomi di Desa Landung sari, kecamatan Dau, kabupaten Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6 (2015)
- Dian Iskandar Jaelani, (2014). Pemberdayaan Ekonomi umat dalam perspektif Islam (sebuah upaya dan strategi), *Eksyar*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014
- Edy Yusuf Agunggunanto, (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMdes), *Jurnal BISNIS*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Herdiansyah Haris, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- <http://www.aminjaya.desa.id>
- <http:kbbi.web.id/model>
- <http:kbbi.web.id/model>
- Hutomo Mardi Yatmo, (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000
- Iswan Gemayana, (2010). Strategi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 1 Januari 2010
- Kamayanti Ari, (2016). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi Membumikan Religiusitas*, Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kementrian Desa Daerah tertinggal (diakses pada 4 Februari 2018)
- Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Ni Luh Putu Wiagustini, (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (village institutions and village markets) in Denpasar City, Indonesia, *International Journal Of Economics, Commerce And Management*, Vol, III, issue 4, April 2015
- Nugroho Dendi Agung, (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015), *Jurnal JESP*-Vol. 7, No 2 Nopember 2015

Nur Mahmudi Ismail, (2001). *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*, Bandung: ISTECS.

Patton Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Semarang : Pustaka Pelajar
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Rachmat Hardijono, (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes), dalam *Jurnal IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, Volumen 3, Issue 2, Apr 2014

Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*: Jakarta, PT. Grasindo.

Ridlwani Zulkarnain, (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 3 2014

Rozaki Abdur dkk, Prakarsa, (2005). *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desa*, Yogyakarta: IRE PRESS.

Samsinas, (2009). Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 3, Desember 2009

Sidik Fajar, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* Vol 19 No 2

Sugiono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sutopo Ariesto Hadi, (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Umi Hidayati, (2015). Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training, *European Journal of Business and Management*, Vol.7, No.32, 2015

Welli Indra Mayu, (2016). Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Btu Kabupaten Rokan Hulu, *JOM Fisip*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016

www.bkbn.go.id

www.kerjanyaata.id

Zubaedi, (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.